



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat



RENCANA AKSI

TAHUN 2026



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I

<https://pkp.go.id>

[@kementerianpkp](https://www.instagram.com/@kementerianpkp)

[@bp3kp_papua1](https://www.instagram.com/@bp3kp_papua1)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya sehingga dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2025, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen rencana aksi ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen ini disusun sebagai sarana perencanaan dan pengendalian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Hal-hal yang kami sampaikan dalam dokumen ini masih terdapat kekurangan, sehingga kami sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di tahun berikutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan semoga laporan ini dapat memberikan arahan kinerja yang terukur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2026.

Jayapura, Maret 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I**

MICKHAEL NICOLAS DEMENA, ST., MT
NIP. 19800813 200312 1 004

DAFTAR ISI

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tugas dan Fungsi.....	2
1.3	Struktur Organisasi	4
1.3	Kapasitas Organisasi	11
1.3.1	Sumber Daya Manusia.....	11
1.3.1.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin	15
1.3.1.2	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	17
1.3.1.3	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Pendidikan Pendidikan Terakhir	18
1.3.2.4	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Generasi	19
1.3.2	Sarana Prasarana	20
1.4	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	34
1.4.1	DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	35
1.4.2	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	44
1.5	Aspek strategis dan isu strategis.....	49
1.5.1	Aspek Strategis	49
1.5.2	Isu Strategis	49
2.1	Perjanjian Kinerja	51
2.1.1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	51
2.1.2	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	53
2.1.3	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	54
2.1.4	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	56
2.1.5	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ...	57
2.2	Program dan Kegiatan	59
2.2.1	Program dan Kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	59
2.3	Metode Pengukuran.....	63
2.4	Target Kinerja Triwulan.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah BP3KP Papua I	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan	9
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	10
Gambar 1.4	Jumlah SDM BP3KP Papua I Tahun 2026	11
Gambar 1.5	Perbandingan SDM Satker	12
Gambar 1.6	Perbandingan SDM BP3KP Papua I	16
Gambar 1.7	Perbandingan SDM BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Golongan	17
Gambar 1.8	Perbandingan SDM BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Kelompok Jabatan	18
Gambar 1.9	Perbandingan SDM BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Pendidikan ..	19
Gambar 1.10	Kantor BP3KP Papua I	21
Gambar 1.11	DIPA Satker BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal	36
Gambar 1.12	DIPA Satker BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	37
Gambar 1.13	DIPA Satker BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	39
Gambar 1.14	DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perkotaan	41
Gambar 1.15	DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	43
Gambar 1.16	DIPA Satker PKP Provinsi Papua Sekretariat Jenderal	44
Gambar 1.17	DIPA Satker PKP Provinsi Papua Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman ..	45
Gambar 1.18	DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perdesaan	46
Gambar 1.19	DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perkotaan	48
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal TA 2026	53
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman TA 2026 ...	54
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2026 ..	56
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA.2026	57
Gambar 2.5	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026	11
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia berdasarkan Unit Kerja Tahun 2026	12
Tabel 1.3	Sumber Daya Manusia Satker Balai Pelaksana	13
Tabel 1.4	Sumber Daya Manusia Satker Perumahan	14
Tabel 1.5	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel 1.6	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Golongan	17
Tabel 1.7	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Kelompok Jabatan	18
Tabel 1.8	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 1.9	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Generasi	19
Tabel 1.10	Sarana Prasarana Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	22
Tabel 1.11	Sarana Prasarana Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	28
Tabel 1.12	Pagu Awal Balai Pelaksana Penyediaan	34
Tabel 1.13	Rincian Kegiatan DIPA Awal Satker BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal	36
Tabel 1.14	Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman ...	37
Tabel 1.15	Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I	43
Tabel 1.16	Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Sekretariat Jenderal	45
Tabel 1.17	Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Kawasan Permukiman	46
Tabel 1.18	Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perdesaan	47
Tabel 1.19	Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perkotaan	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik yang mencakup pengukuran kinerja tahunan, serta evaluasi kinerja triwulan dan tahunan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu Perjanjian Kinerja memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan dibawahnya untuk melaksanakan program / kegiatan berdasarkan indikator kinerja. Dalam pelaksanaannya, target didalam Perjanjian Kinerja diperincikan kedalam suatu Rencana Aksi Kinerja. Rencana aksi adalah dokumen rencana tindak dalam bentuk program / kegiatan secara sistematis untuk mencapai target indikator kinerja utama pada sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Perencanaan Kinerja (PK). Rencana aksi meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target kinerja sebagai output / outcome pelaksanaan program / kegiatan, penanggung jawab program / kegiatan, pelaksana program/kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan dan penjelasan pengendalian pencapaian target kinerja triwulan dari target tahunan yang telah ditetapkan. Rencana aksi digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kegiatan selama satu tahun agar lebih terarah, efektif dan efisien dalam mencapai sasaran strategis dan *outcome* yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan bagi penerima amanah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah diperjanjikan;
2. Mewujudkan pelaksanaan program kegiatan yang lebih terarah dalam rangka pencapaian target yang telah diperjanjikan;

3. Sebagai dasar penentuan pelaksanaan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan beserta penggunaan anggaran, tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima Amanah;
5. Sebagai dasar pengukuran pencapaian target secara periodik.

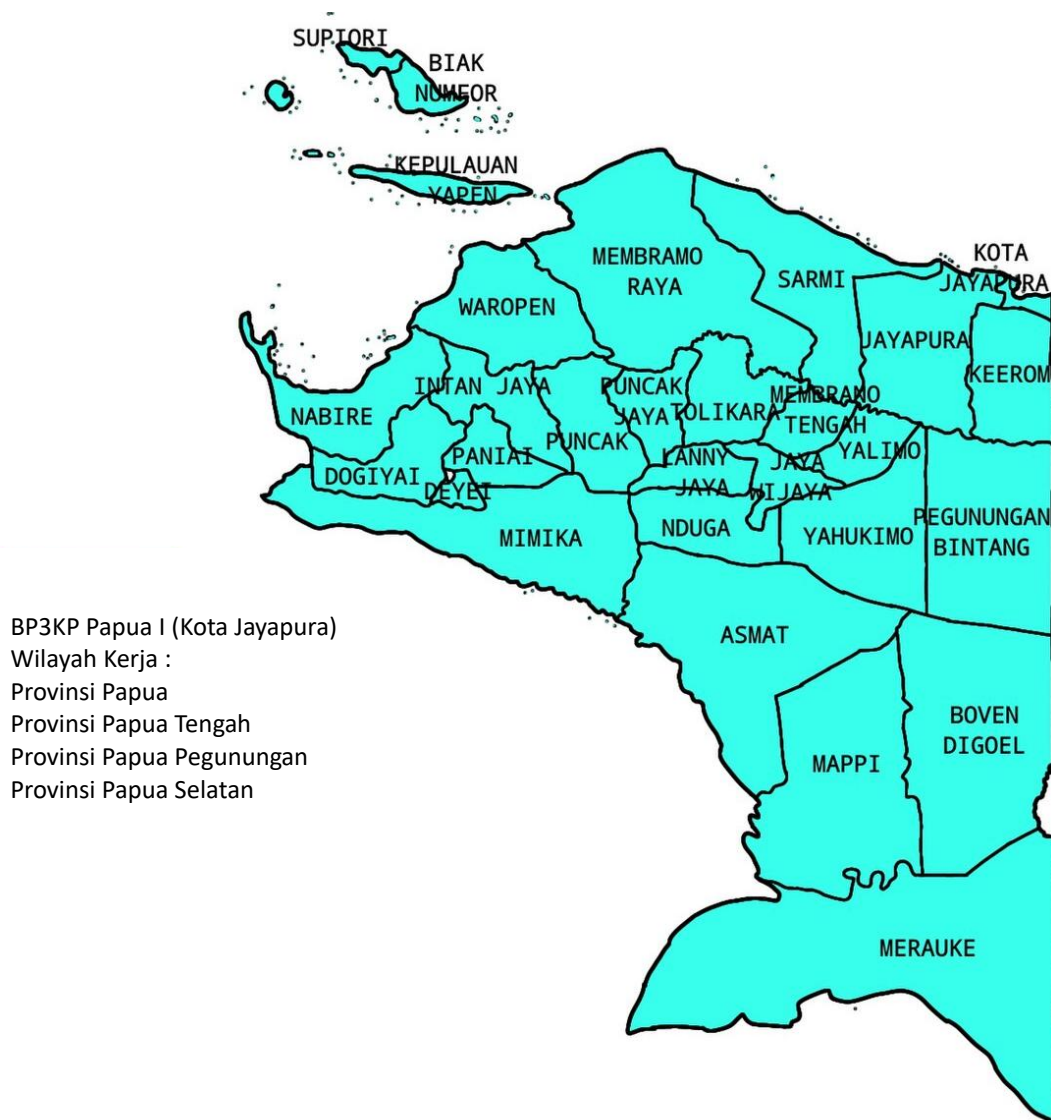
Rencana aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua dan Kawasan Permukiman Papua I akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan komponen SAKIP berikutnya yaitu Pengukuran Kinerja.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I (BP3KP) Papua 1 merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I (BP3KP) Papua 1 merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas I yang berlokasi di Jayapura dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori), Provinsi Papua Tengah (Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya), Provinsi Papua Pegunungan (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Nduga) dan Provinsi Papua Selatan (Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel). Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mempunyai tugas **“melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan**

kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitasi serah terima aset”.



Gambar 1.1 Peta Wilayah BP3KP Papua I

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis Pembangunan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki jalur koordinasi dengan unit kerja pusat lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didukung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Kepala Seksi pelaksanaan wilayah II yang menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana Satker Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Balai.

1. Sub bagian Umum dan Tata Usaha

Sub bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.

2. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen;
- b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah pesisir.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I. Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 2 (dua) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua yang dipimpin oleh

Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 2 (dua) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

a. Kepala Satuan Kerja (Kasatker)

Kasatker bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- 2) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada pejabat inti satuan kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
- 3) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, utilitas umum dan kawasan permukiman;
- 4) Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, utilitas umum dan kawasan permukiman;
- 5) Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, utilitas umum dan kawasan permukiman;
- 6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, utilitas umum dan kawasan permukiman;

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mempunyai 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen yaitu PPK Perencanaan dan Pengendalian, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus, dan PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan,

Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PPK memiliki tugas dan wewenang untuk :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
- 2) Menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
- 3) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
- 4) Melaksanakan kegiatan Swakelola;
- 5) Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian yang dilakukannya;
- 6) Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- 7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- 8) Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- 11) Menerbitkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 12) Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
- 13) Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
- 14) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Selain itu, PPK juga bertanggungjawab terhadap :

- 1) Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- 2) Kebenaran data supplier dan data kontrak;
- 3) Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
- 4) Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.

c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 2 (dua) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang masing-masing berkedudukan di Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan

pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. PPSPM memiliki tugas dan wewenang yaitu :

- 1) Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- 2) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 3) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- 4) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
- 5) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- 6) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

d. Bendahara

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 2 (dua) bendahara pengeluaran yang masing-masing berkedudukan di Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- 2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- 3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 4) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
- 5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara;
- 6) Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- 7) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN.

Adapun bagan struktur koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :



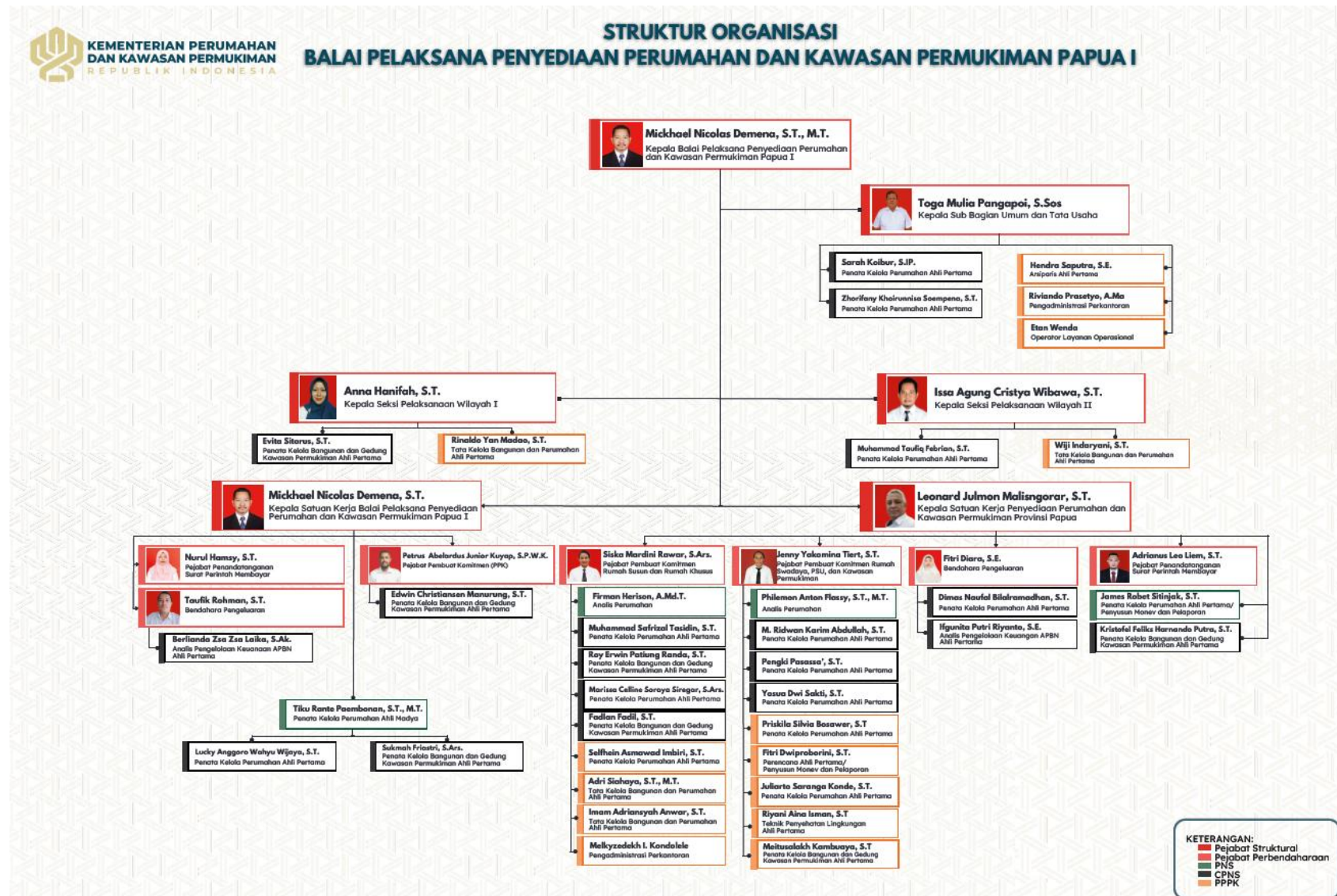
Keterangan:

----- garis koordinasi

———— garis komando

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Nomor : 1/KPTS/Bp18/2026 tanggal 08 Januari 2026 tentang Penempatan Pegawai dalam Jabatan-Jabatan di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun Anggaran 2026.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

1.3 Kapasitas Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki kapasitas organisasi yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.

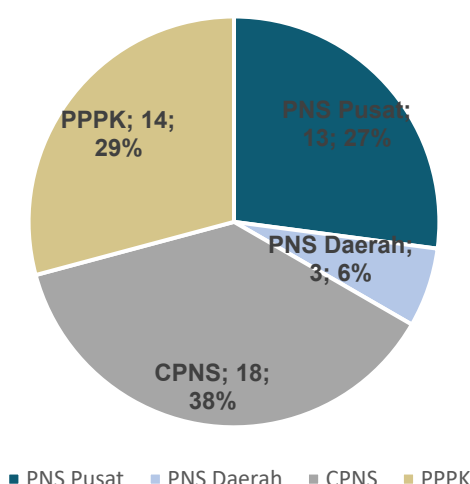
1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan yaitu sejumlah 48 pegawai. Komposisi sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I terdiri dari 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil Daerah, 18 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 14 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut tabel sumber daya manusia tahun 2026 di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS Pusat	13
2	PNS Daerah yang diperbantukan	3
3	CPNS	18
2	PPPK	14
Total		48

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua I Bulan Januari Tahun 2026

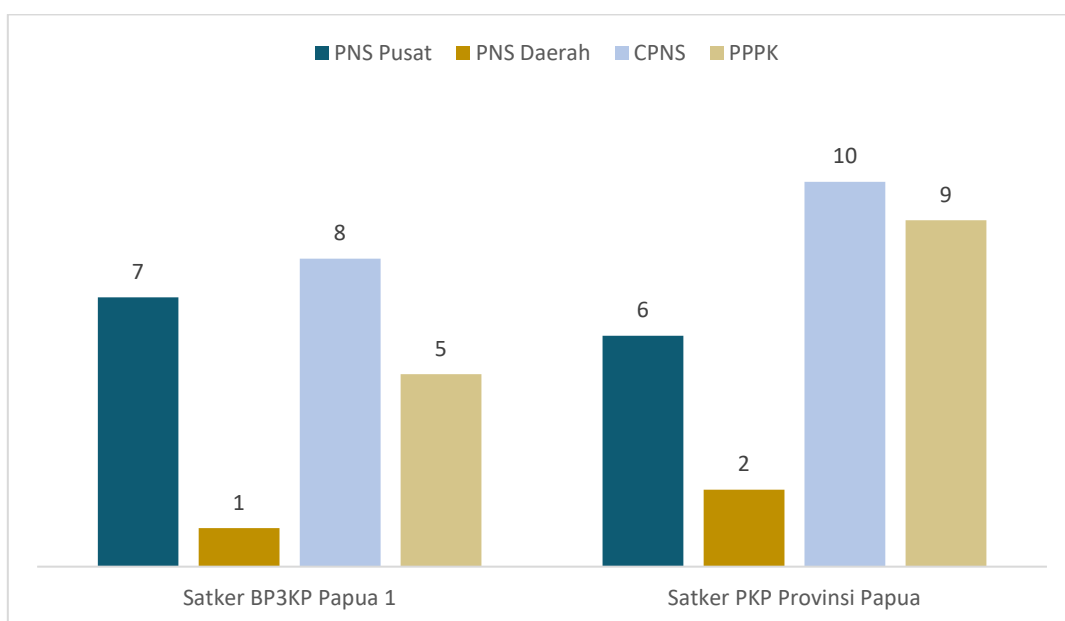


Gambar 1.4 Jumlah SDM BP3KP Papua I Tahun 2026

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Unit Kerja Tahun 2026

No	Uraian	Unit Kerja		Total
		Satker BP3KP Papua I	Satker PKP Prov Papua	
1	PNS Pusat	7	6	13
2	PNS Daerah yang diperbantukan	1	2	3
3.	CPNS	8	10	18
4.	PPPK	5	9	14
Total		21	27	48

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua I Bulan Januari Tahun 2026



Gambar 1.5 Perbandingan SDM Satker BP3KP Papua I dan Satker PKP Provinsi Papua Tahun 2026

Jumlah ASN (PNS, CPNS dan PPPK) di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2026 sejumlah 48 pegawai tidak sebanding dengan volume pekerjaan dan luas cakupan wilayah balai (Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah). Oleh karena itu, strategi yang diterapkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I terkait sumber daya manusia untuk memperkuat kinerja balai dan mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2026 yaitu dengan cara mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan pemanfaatan sumberdaya manusia secara efektif melalui penempatan strategis pegawai di satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Nomor : 1/KPTS/Bp18/2026 tanggal 08 Januari 2026 tentang Penempatan Pegawai dalam Jabatan-Jabatan di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun Anggaran 2026, berikut penempatan sumberdaya manusia di satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua :

**Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Satker Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2026**

No	NAMA / NIP	GOL	Jabatan	Penempatan Pada Balai/ Satker
1	Mickhael Nicolas Demena, ST., MT NIP. 19800813 200312 1 004	IV/a	Kepala Balai	
2.	Toga Mulia Pangapoi, S.Sos NIP. 19730919 200812 1 001	III/d	Kasubbag Umum dan TU	
3.	Anna Hanifah, ST NIP. 19761217 200502 2 004	III/d	Kasie Pelaksana Wilayah I	
4.	Issa Agung Cristya Wibawa, ST NIP. 19821012 201412 1 001	III/c	Kasie Pelaksana Wilayah II	
5.	Petrus A. Junior Kuyap, S.P.W.K NIP. 19950620 202012 1 001	III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Balai	
6.	Nurul Hamsy, ST NIP. 19840315 201503 2 001	III/a	PP-SPM	
7.	Taufik Rohman, ST NIP. 19841115 201104 1 001	III/a	Bendahara/ Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	
8.	Tiku Rante Paembonan, ST., MT NIP. 19671213 200212 1 002	IV/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	
9.	Sukmah Friastri, S.Ars. NIP. 20000609 202506 2 021	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Klinik Perumahan
10.	Lucky Anggoro Wahyu Wijaya, S.Ars. NIP. 199810272025061010	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Klinik Perumahan
11.	Evita Sitorus, S.T. NIP. 20000309 2025062020	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Kasie Pelaksanaan Wilayah I
12.	Rinaldo Yan Madao, ST NIPPPK. 19870209 202421 1 009	IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kasie Pelaksanaan Wilayah I
13	Edwin Christiansen Manurung, S.T. NIP. 20010605 202506 1 008	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	PPK Balai
14	Berlianda Zsa Zsa Laika, S. Ak NIP. 19980804 202506 2 016	III/a	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Bendahara
15	Fadlan Fadil, S.T NIP. 19970417 202506 1 005	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Bendahara

No	NAMA / NIP	GOL	Jabatan	Penempatan Pada Balai/ Satker
16.	Riyani Aina Isman, ST NIPPPK. 19940103 202321 2 048	IX	Penata Lingkungan Ahli Pertama	Kasie Pelaksanaan Wilayah I
17.	Meitusalahk A.Kambuaya, ST NIPPPK. 19820506 202421 1 004	IX	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Kasie Pelaksanaan Wilayah I
18.	Marissa Celline Soraya Siregar, S.Ars NIP. 20001205 202506 2 018	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kasie Pelaksanaan Wilayah II
19.	Muhammad Taufiq Febrian, S.T. NIP. 20010215 202506 1 006	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kasie Pelaksanaan Wilayah II
20.	Juliarto Saranga Konde, ST NIPPPK. 19950718 202421 1 010	IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kasie Pelaksanaan Wilayah II
21.	Wiji Indaryani, S.T. NIPPPK. 19810120 202321 2 021	IX	Teknik Tata Bangunan Perumahan Ahli Pertama	Kasie Pelaksanaan Wilayah II
22.	Sarah Koibur, S.IP NIP. 20001004 202506 2 006	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kasubbag Umum dan TU
23.	Zhorifany Khoirunnisa Soempena, S.T NIP. 20001027 202506 2 007	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kasubbag Umum dan TU
24.	Hendra Saputra, SE NIPPPK. 19920621 202321 1 017	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Kasubbag Umum dan TU
25.	Fitri Dwiproboringi, ST NIPPPK. 19920429 202321 2 044	IX	Perencana Ahli Pertama	Kasubbag Umum dan TU
26.	Priskila Silvia Bosawer, ST NIPPPK. 19840928 202421 2 001	IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kasubbag Umum dan TU
27.	Riviando Prasetyo, A.Ma NIPPPK. 19920708 202521 1 064	V	Pengadministrasi Umum	Kasubbag Umum dan TU
28.	Melkyzedekh I. Kondolele NIPPPK. 19862025 202521 1 066	V	Pengadministrasi Umum	Kasubbag Umum dan TU
29.	Etan Wenda NIPPPK. 197901312 202521 1 100	V	Satpam	Kasubbag Umum dan TU

Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Tahun 2026

No	NAMA / NIP	GOL	Jabatan	Penempatan Pada Balai/ Satker
1.	Leonard Julmon Malisngorar, ST NIP. 19711110 200212 1 010	III/d	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) / PPK Randal	
2.	Siska Mardini Rawar, S.Ars NIP. 19880302 201802 2 001	III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus	
3.	Jenny Y. Tiert, ST NIP. 19930629 201903 2 007	III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman	

No	NAMA / NIP	GOL	Jabatan	Penempatan Pada Balai/ Satker
4.	Adrianus Leo Liem, S.T. NIP. 19920811 202203 1 005	III/b	PP-SPM	
5.	Fitri Diara, SE. NIP. 19810424 200801 2 019	III/c	Bendahara	
6.	Dimas Naufal Bilalramadhan, S.T. NIP. 199912192025061004	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Bendahara
7.	Ilgunita Putri Riyanto, S.E. NIP. 199604052025062007	III/a	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Bendahara
8.	James Robet Sitinjak, S.T. NIP. 19910817 202203 1 006	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Ahli Pertama/ Penyusun Program dan Anggaran	PPK Randal
9.	Philemon A. Flassy, ST., MT NIP. 19810205 201104 1 001	III/d	Analisis Perumahan	PPK Rumah Swadaya, PSU dan KP
10.	Kristofel F. Harnando Putra, S.T NIP. 200107042025061006	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	PPK Randal
11.	Selfein Asmawid Imbiri, ST NIPPPK. 198805052025211100	IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPK Randal
12.	Firman Herison, A.Md.T. NIP. 19701030 200701 1 003	III/b	Analisis Perumahan	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus
13.	Muhammad Safrizal Tasidin, S.T. NIP. 199301182025061003	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kaur Data Rumah Susun dan Rumah Khusus
14.	Roy Erwin Patiung Randa, S.T NIP. 200106232025061005	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Kaur Teknik Rumah Susun dan Rumah Khusus
15.	Adri Siahaya, ST,MT NIP. 19880401 202321 1 024	IX	Teknik Tata Bangunan Perumahan Ahli Pertama	PPK Rumah Susun
16.	Imam Adriansyah Anwar, ST NIPPPK. 19890531 2023 21 1 020	IX	Teknik Tata Bangunan Perumahan Ahli Pertama	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus
17.	M. Ridwan Karim Abdullah, S.T. NIP. 199902042025061012	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPK Rumah Swadaya, PSU dan KP (Kaur PSU)
18.	Pengki Pasassa, S.T. NIP. 199409242025061005	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPK Rumah Swadaya, PSU dan KP (Kaur Sanitasi Kumuh)
19.	Yosua Dwi Sakti, S.T NIP. 199806012025061005	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPK Rumah Swadaya, PSU dan KP (Kaur Ruswa)

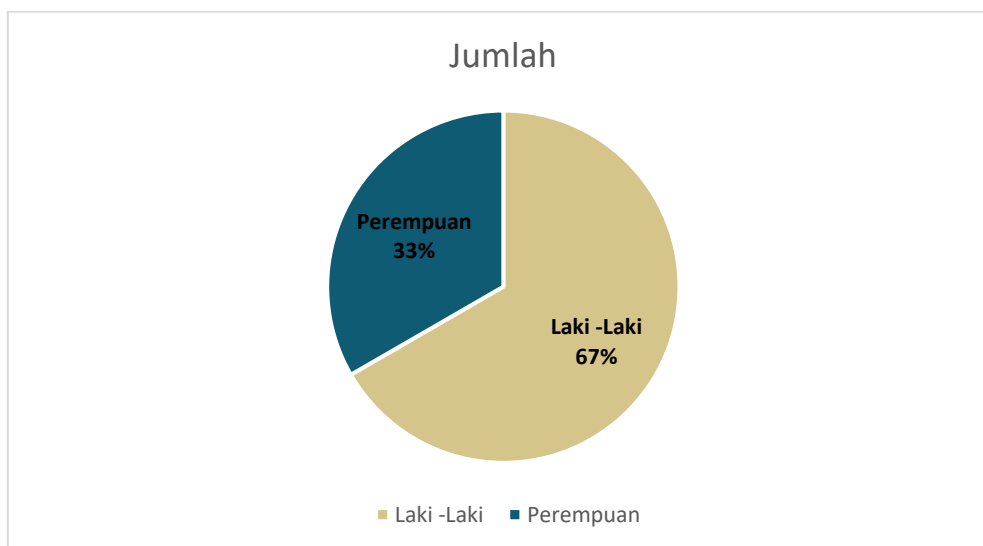
1.3.1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.5 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	11	5
2	CPNS	11	7
3	PPPK	10	4
Total		32	16

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua I Tahun 2026

**Gambar 1.6 Perbandingan SDM BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan Tabel 1.5 dan Gambar 1.6 menunjukkan bahwa jumlah *gender* laki-laki adalah sebanyak 32 orang (67%) lebih banyak dari jumlah *gender* perempuan sebanyak 16 orang (33%). Presentase pegawai perempuan sebesar 33 % dari total sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I telah melebihi presentase yang distandarkan (>30%) sebagai pengaraustamaan *gender*. Jumlah ini menunjukkan kontribusi dan peran aktif perempuan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai serta adanya kesetaraan *gender* dalam jabatan strategis yang ditunjukkan dengan pegawai perempuan menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus dan PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk menduduki jabatan didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja individu, bukan pada jenis kelaminnya.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I perlu mempertimbangkan fasilitas kantor yang mendukung pengaraustamaan *gender* seperti penyediaan fasilitas kantor seperti ruang laktasi, tempat bermain anak dan fasilitas

pendukung lainnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan mendukung produktivitas semua pegawai, terutama perempuan.

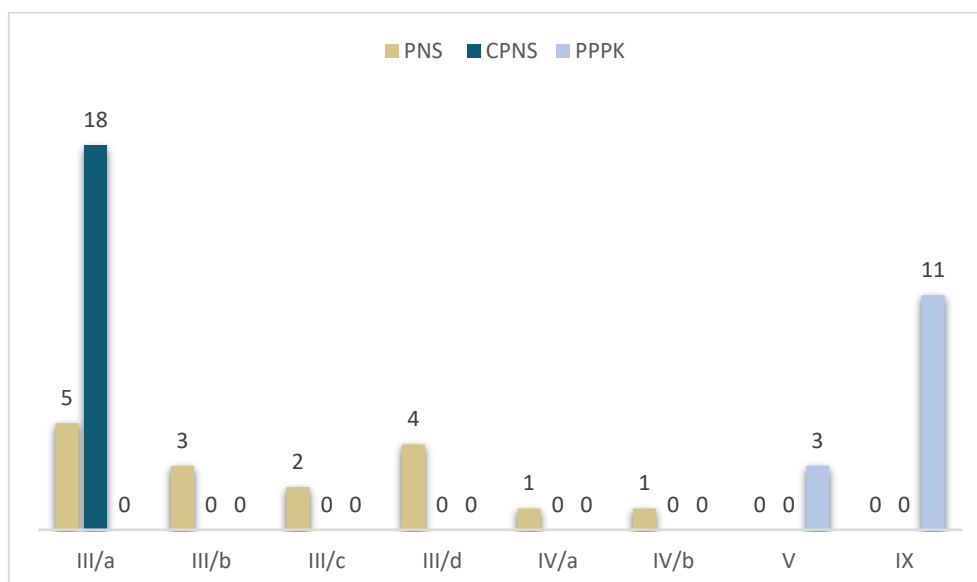
1.3.1.2 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Sumber daya manusia berdasarkan golongan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian		
		PNS	CPNS	PPPK
1	III/a	5	18	-
2	III/b	3	-	-
3	III/c	2	-	-
4	III/d	4	-	-
5.	IV/a	1	-	-
6.	IV/b	1	-	-
7.	V	-	-	3
8.	IX	-	-	11

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua I Tahun 2026



Gambar 1.7 Perbandingan SDM BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Golongan

Berdasarkan Tabel 1.6 dan Gambar 1.7 dapat dilihat bahwa sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didominasi oleh pegawai golongan III/a yaitu sebanyak 23 pegawai terdiri dari PNS sebanyak 5 (lima) orang

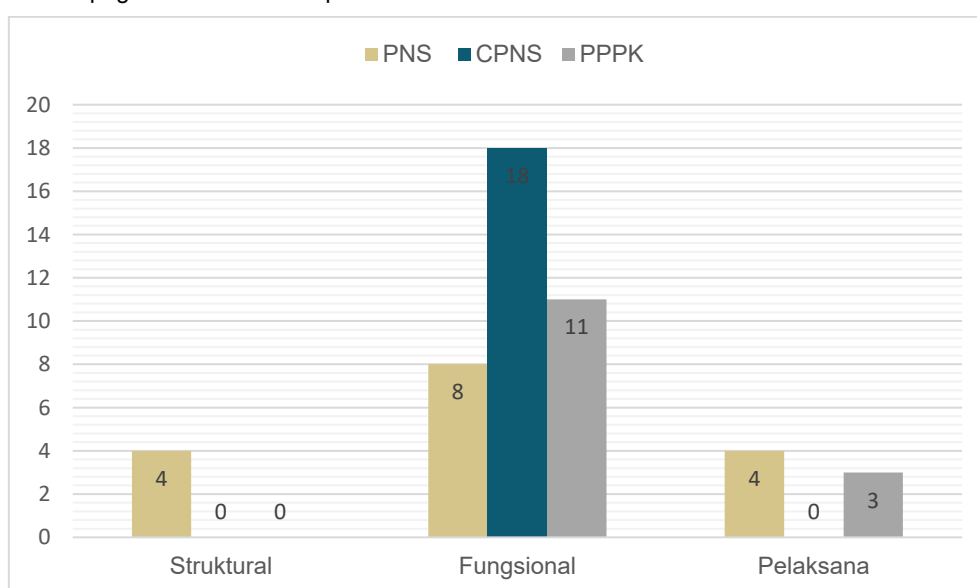
dan CPNS sebanyak 18 orang. Sedangkan untuk pegawai PPP3K didominasi golongan IX yaitu sebanyak 11 orang.

Sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I berdasarkan kelompok jabatan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu struktural, fungsional dan pelaksana yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.7 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Status Kepegawaian	Jabatan			Jumlah
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	PNS	4	8	5	16
2	CPNS	0	18	0	18
3	PPPK	0	11	3	14

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua I Tahun 2026



Gambar 1.8 Perbandingan SDM BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Kelompok Jabatan

Berdasarkan Tabel 1.7 dan Gambar 1.8 dapat disimpulkan dari 48 pegawai, terdapat 4 (empat) PNS dengan jabatan struktural, 37 pegawai dengan jabatan fungsional yang terdiri dari 8 (delapan) PNS, 18 orang CPNS dan 11 orang PPPK, 7 (tujuh) pegawai dengan jabatan pelaksana yang terdiri dari 4 (empat) orang PNS dan 3 (tiga) orang PPPK.

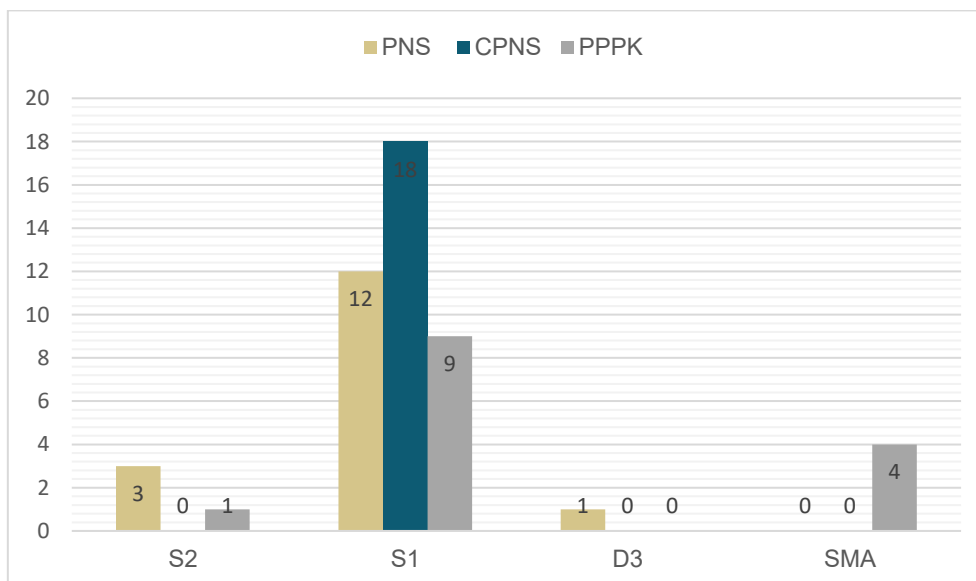
1.3.1.3 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.8 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Status Kepegawaian			Jumlah
	PNS	CPNS	PPPK	
S2	3	0	1	4
S1	12	18	9	39
D3	1	0	0	1

Pendidikan Terakhir	Status Kepegawaian			Jumlah
	PNS	CPNS	PPPK	
SMA	0	0	4	4

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua I Tahun 2026



Gambar 1.9 Perbandingan SDM BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 1.8 dapat disimpulkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan terakhir S1 sebanyak 39 orang terdiri dari PNS sebanyak 12 orang, CPNS sebanyak 18 orang dan PPPK sebanyak 9 orang. Pendidikan terakhir SMA sebanyak 4 orang yaitu PPPK. Pendidikan terakhir S2 sebanyak 4 orang terdiri dari PNS sebanyak 3 orang dan PPPK sebanyak 1 orang Pendidikan terakhir D3 yaitu PNS sebanyak 1 orang (2%). Dengan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

1.3.2.4 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Generasi

Sumber daya manusia dikelompokkan berdasarkan generasi bertujuan untuk memahami karakter dan perbedaan setiap generasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sehingga dapat digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan sumber daya manusia guna mengoptimalkan kinerja pegawai.

Tabel 1.9 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I Tahun 2026 berdasarkan Generasi

Kelompok Generasi	Status Kepegawaian			Jumlah
	PNS	CPNS	PPPK	
<i>Baby Boomers</i> (1946-1964)	0	0	0	0
X (1965-1980)	6	0	1	7

Kelompok Generasi	Status Kepegawaian			Jumlah
	PNS	CPNS	PPPK	
Y (1981-1996)	10	3	13	26
Z (1997-2009)	0	15	0	15

sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua I Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.9 dapat disimpulkan bahwa dari jumlah sumber daya manusia yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didominasi oleh generasi Y (usia produktif >30 tahun) sebanyak 54,17% disusul oleh generasi Z sebanyak 31,25 % dan generasi X sebanyak 14,58% . Adanya perbedaan generasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I diharapkan dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, adaptif dan inovatif. Dengan adanya generasi Z sebanyak 31,25% diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan visi-misi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.

1.3.2 Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang menunjang pencapaian kinerja satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua merupakan aset Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I yang telah dilakukan alih aset (likuidasi) pada tanggal 22 Desember 2025 dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I eks Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan gedung dan bangunan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I yang digunakan sebagai kegiatan perkantoran masih menempati gedung sewa sehingga belum termasuk aset tetap milik balai. Gedung kantor terdiri dari 3 lantai dengan luas total bangunan gedung 1814,4 m² yang terletak di Kompleks Ruko, jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.



Gambar 1.10 Kantor BP3KP Papua I

Sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dicatat pada aplikasi SIMAK BMN 2025 dan dilaporkan pada Sekretariat Jenderal sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola barang milik negara. Sarana prasarana di satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I senilai Rp. 792.568.000 dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp. 964.059.600. Berikut rincian kondisi sarana prasarana dapat dilihat pada Tabel 1.10 dan Tabel 1.11.

Tabel 1.10 Sarana Prasarana Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK /TYPE	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	KONDISI B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	1	2021-05-05	Informa	1 Unit	3.000.000	B
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	2021-05-05	Informa	1 Unit	3.000.000	B
3	3050104001	Lemari Besi/Metal	3	2021-05-05	Informa	1 Unit	3.000.000	B
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	4	2023-11-24	Lemari Besi Importa	1 Unit	8.000.000	B
5	3050104002	Lemari Kayu	1	2023-11-24	Lemari Kayu Informa	1 Unit	8.000.000	B
6	3050104002	Lemari Kayu	2	2024-05-17	Lemari Rak Buku	1 Unit	2.450.000	B
7	3050104007	Brandkas	1	2022-06-27	Brandkas (Krisbow Type Fire Safe) Digital Dan Keylock Es-100	1 Unit	22.000.000	B
8	3050105048	Lcd Projector/Infocus	1	2023-10-24	Infocus	1 Unit	16.000.000	B
9	3050105058	Focusing Screen/Layar Lcd Projector	1	2023-10-24	Layar Proyektor Gantung	1 Unit	6.000.000	B
10	3050201002	Meja Kerja Kayu	1	2022-11-25	Meja Tamu Custome Cendrawasi Design	1 Unit	2.900.000	B
11	3050201002	Meja Kerja Kayu	2	2022-11-25	Meja Receptionist Custome Cendrawasih Design	1 Unit	8.000.000	B
12	3050201002	Meja Kerja Kayu	3	2023-11-24	Meja Kerja Glory	1 Unit	1.500.000	B
13	3050201002	Meja Kerja Kayu	4	2023-11-24	Meja Kerja Glory	1 Unit	1.500.000	B
14	3050201002	Meja Kerja Kayu	5	2023-11-24	Meja Kerja Glory	1 Unit	1.500.000	B
15	3050201002	Meja Kerja Kayu	6	2023-11-24	Meja Kerja Glory	1 Unit	1.500.000	B

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK /TYPE	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	KONDISI B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	3050201002	Meja Kerja Kayu	7	2023-11-24	Meja Kerja Glory	1 Unit	1.500.000	B
17	3050201002	Meja Kerja Kayu	8	2023-11-24	Meja Kerja Glory	1 Unit	1.500.000	B
18	3050201002	Meja Kerja Kayu	9	2023-11-24	Meja Kerja Glory	1 Unit	1.500.000	B
19	3050201002	Meja Kerja Kayu	10	2024-05-17	Meja Kerja Staf	1 Unit	1.500.000	B
20	3050201002	Meja Kerja Kayu	11	2024-05-17	Meja Kerja Staf	1 Unit	1.500.000	B
21	3050201002	Meja Kerja Kayu	12	2024-05-17	Meja Kerja Staf	1 Unit	1.500.000	B
22	3050201002	Meja Kerja Kayu	13	2024-05-17	Meja Kerja Staf	1 Unit	1.500.000	B
23	3050201002	Meja Kerja Kayu	14	2024-05-17	Meja Kerja Staf	1 Unit	1.500.000	B
24	3050201003	Kursi Besi/Metal	1	2022-11-25	Kursi Chitose	1 Unit	950.000	B
25	3050201003	Kursi Besi/Metal	2	2022-11-25	Kursi Chitose	1 Unit	950.000	B
26	3050201003	Kursi Besi/Metal	3	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
27	3050201003	Kursi Besi/Metal	4	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
28	3050201003	Kursi Besi/Metal	5	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
29	3050201003	Kursi Besi/Metal	6	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK /TYPE	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	KONDISI B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	3050201003	Kursi Besi/Metal	7	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
31	3050201003	Kursi Besi/Metal	8	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
32	3050201003	Kursi Besi/Metal	9	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
33	3050201003	Kursi Besi/Metal	10	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
34	3050201003	Kursi Besi/Metal	11	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
35	3050201003	Kursi Besi/Metal	12	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
36	3050201003	Kursi Besi/Metal	13	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
37	3050201003	Kursi Besi/Metal	14	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
38	3050201003	Kursi Besi/Metal	15	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
39	3050201003	Kursi Besi/Metal	16	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	Rr
40	3050201003	Kursi Besi/Metal	17	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
41	3050201003	Kursi Besi/Metal	18	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
42	3050201003	Kursi Besi/Metal	19	2024-05-17	Kursi Kerja Staf	1 Unit	1.100.000	B
43	3050201003	Kursi Besi/Metal	20	2024-05-17	Kursi Rapat Padma	1 Unit	2.100.000	B

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK /TYPE	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	KONDISI B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	3050201033	Sofa	1	2024-07-15	Sofa Kayu 1 Set	1 Unit	7.000.000	B
45	3050204004	A.C. Split	1	2022-11-25	Ac Merek Panasonic 1pk	1 Unit	7.700.000	B
46	3050206002	Televisi	1	2022-11-25	Xiaomi Smart Tv 42 Inch	1 Unit	14.850.000	B
47	3050206002	Televisi	2	2024-07-15	Tv Lg 52 Inch	1 Unit	10.200.000	B
48	3050206007	Loudspeaker	1	2022-09-21	Polytron Pas 10d22	1 Unit	6.800.000	B
49	3060102128	Camera Digital	1	2022-06-27	Kamera Fuji Film (Fuji Film Xt-100 Kit 15-45mm)	1 Unit	8.500.000	B
50	3060102128	Camera Digital	2	2024-07-15	Cannon Eos 3000d	1 Unit	9.800.000	B
51	3060102128	Camera Digital	3	2024-08-22	Panasonic Lumix Dmc-G85k	1 Unit	12.000.000	B
52	3060102165	Camera Conference	1	2024-08-22	Logitech Ptz Pro 2	1 Unit	13.000.000	B
53	3060102167	Drone	1	2022-06-27	Dji Mavick	1 Unit	18.000.000	B
54	3060102167	Drone	2	2022-06-27	Dji Mavick	1 Unit	18.000.000	B
55	3060105038	Gps Receiver	1	2022-06-27	Gps (Garmin Gps Map 64 Sc)	1 Unit	8.700.000	B
56	3100102002	Laptop	1	2021-03-04	Asus Dan Macbook	1 Unit	16.827.000	B
57	3100102002	Laptop	2	2021-03-04	Asus Dan Macbook	1 Unit	16.827.000	B
58	3100102002	Laptop	3	2021-03-04	Asus Dan Macbook	1 Unit	16.827.000	B

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK /TYPE	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	KONDISI B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	3100102002	Laptop	4	2021-03-04	Asus Dan Macbook	1 Unit	16.827.000	B
60	3100102002	Laptop	5	2022-12-12	Dell Precision 3570-001	1 Unit	41.998.000	B
61	3100102002	Laptop	6	2022-12-20	Msi Stealth Gs77 (Rtx 3080ti 16 Gb Ddr 6)	1 Unit	77.200.000	B
62	3100102002	Laptop	7	2023-10-24	Laptop Lenovo Ideapaad 3 I5	1 Unit	12.750.000	B
63	3100102002	Laptop	8	2023-10-24	Laptop Lenovo Ideapaad 3 I5	1 Unit	12.750.000	B
64	3100102002	Laptop	9	2023-10-24	Laptop Lenovo Ideapaad 3 I5	1 Unit	12.750.000	B
65	3100102002	Laptop	10	2023-10-24	Laptop Lenovo Ideapaad 3 I5	1 Unit	12.750.000	B
66	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2021-03-04	Epson L3110	1 Unit	2.627.000	B
67	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2021-03-04	Epson L3110	1 Unit	2.627.000	B
68	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2021-03-04	Epson L3110	1 Unit	2.627.000	B
69	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2021-03-04	Epson L3110	1 Unit	2.627.000	B
70	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	2024-08-22	Epson L3251	1 Unit	5.325.000	B
71	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2024-08-22	Epson L3251	1 Unit	5.325.000	B
72	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2024-08-22	Epson L3251	1 Unit	5.325.000	B
73	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	2024-08-22	Epson L3251	1 Unit	5.325.000	B

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK /TYPE	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	KONDISI B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	2021-03-04	Scanner Plustek	1 Unit	6.577.000	B
75	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2021-03-04	Scanner Plustek	1 Unit	6.577.000	B
76	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	2024-08-22	Brother Ads-3100	1 Unit	7.625.000	B
77	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	2024-08-22	Brother Ads-3100	1 Unit	7.625.000	B
78	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	2024-08-22	Brother Ads-3100	1 Unit	7.625.000	B
79	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	2024-08-22	Brother Ads-3100	1 Unit	7.625.000	B
80	8010101001	Software Komputer	1	2022-11-28	Software Bim (Pt. Glodon Technical Indonesia)	1 Unit	222.000.000	B
Total						80 Nup	792.568.000	

Sumber : Data SIMAK BMN BP3KP Papua I 2025

Tabel 1.11 Sarana Prasarana Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Harga Barang	Kondisi B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	2016	Lemari Lion	1	Buah	2.700.000	B
2	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2	2016	Lemari Lion	1	Buah	2.700.000	B
3	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	3	2016	Lemari Datascrip	1	Buah	3.900.000	B
4	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	4	2018	Lemari Arsip 2 Pintu	1	Buah	4.740.000	RR
5	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	5	2018	Lemari Arsip 2 Pintu	1	Buah	4.740.000	RR
6	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	6	2018	Lemari Arsip 2 Pintu	1	Buah	4.740.000	B
7	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	7	2018	Lemari Arsip 2 Pintu	1	Buah	4.740.000	B
8	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	8	2018	Lemari Arsip 2 Pintu	1	Buah	4.740.000	B
9	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	9	2018	Lemari Arsip 2 Pintu	1	Buah	4.740.000	B
10	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	2016	Lemari Glory	1	Buah	1.200.000	B
11	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	441	2020	Lemari Kayu 2 Pintu	1	Buah	20.310.590	B
12	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	442	2020	Lemari Kayu 4 Pintu	1	Buah	23.078.140	B
13	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	443	2020	Lemari Kayu 4 Pintu	1	Buah	23.078.140	B
14	3.05.01.04.007	Brandkas	1	2016	Brandkas Akashi	1	Buah	8.000.000	B
15	3.05.01.05.048	Lcd Projector/Infocus	1	2016	Projector Epson	1	Buah	7.920.000	B
16	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	2016	Meja Kayu ½ Glory	1	Buah	1.150.000	RR
17	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2	2016	Meja Kayu ½ Glory	1	Buah	1.150.000	RR
18	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	3	2016	Meja Kayu ½ Glory	1	Buah	1.150.000	RR
19	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	4	2016	Meja Kayu ½ Glory	1	Buah	1.150.000	RR
20	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	5	2016	Meja Kayu ½ Glory	1	Buah	1.150.000	RR
21	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	6	2016	Meja Kayu ½ Glory	1	Buah	1.150.000	RR
22	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	7	2016	Meja Kayu ½ Glory	1	Buah	1.150.000	RR
23	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	8	2016	Meja Kayu 1 Glory	1	Buah	1.600.000	B
24	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	9	2016	Meja Kayu 1 Glory	1	Buah	1.600.000	B

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Harga Barang	Kondisi B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	10	2016	Meja Kayu 1 Glory	1	Buah	1.600.000	B
26	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	11	2016	Meja Kayu 1 Glory	1	Buah	1.600.000	B
27	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	12	2016	Meja Kayu 1 Glory	1	Buah	1.600.000	B
28	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	188	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
29	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	189	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
30	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	190	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
31	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	191	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
32	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	192	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
33	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	193	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
34	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	194	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
35	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	195	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
36	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	196	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
37	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	197	2018	Meja Kantor Ukuran 120x60x75	1	Buah	1.539.000	B
38	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	356	2020	Meja Direktur	1	Buah	16.310.590	B
39	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	357	2020	Meja 1 Biro	1	Buah	11.902.590	B
40	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	358	2020	Meja 1 Biro	1	Buah	11.902.590	B
41	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1	2016	Kursi Susun Futura	1	Buah	400.000	RR
42	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2	2016	Kursi Susun Futura	1	Buah	400.000	RR
43	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	3	2016	Kursi Susun Futura	1	Buah	400.000	RR
44	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	4	2016	Kursi Susun Futura	1	Buah	400.000	RR
45	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	5	2016	Kursi Susun Futura	1	Buah	400.000	B
46	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	6	2016	Kursi Susun Futura	1	Buah	400.000	B
47	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	7	2016	Kursi Susun Futura	1	Buah	400.000	B
48	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	8	2016	Kursi Susun Futura	1	Buah	400.000	B
49	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	9	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	B
50	3.05.02.01.004	Kursi Besi/Metal	10	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	B
51	3.05.02.01.005	Kursi Besi/Metal	11	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	RR

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Harga Barang	Kondisi B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	3.05.02.01.006	Kursi Besi/Metal	12	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	RR
53	3.05.02.01.007	Kursi Besi/Metal	13	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	RR
54	3.05.02.01.008	Kursi Besi/Metal	14	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	RR
55	3.05.02.01.009	Kursi Besi/Metal	15	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	B
56	3.05.02.01.010	Kursi Besi/Metal	16	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	B
57	3.05.02.01.011	Kursi Besi/Metal	17	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	B
58	3.05.02.01.012	Kursi Besi/Metal	18	2018	Kursi Frontline	1	Buah	1.367.000	B
59	3.05.02.01.013	Kursi Besi/Metal	19	2020	Kursi Direktur	1	Buah	8.485.590	B
60	3.05.02.01.014	Kursi Besi/Metal	20	2020	Kursi Direksi	1	Buah	6.110.590	B
61	3.05.02.01.015	Kursi Besi/Metal	21	2020	Kursi Direksi	1	Buah	6.110.590	B
62	3.05.02.01.007	Bangku Panjang Kayu	324	2020	Kursi Sofa	1	Buah	11.310.590	B
63	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	2016	Kursi Fantoni	1	Buah	850.000	B
64	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	2016	Kursi Fantoni	1	Buah	850.000	B
65	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	3	2016	Kursi Fantoni	1	Buah	850.000	B
66	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	4	2016	Kursi Fantoni	1	Buah	850.000	B
67	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	5	2016	Kursi Fantoni	1	Buah	850.000	B
68	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	6	2016	Kursi Fantoni	1	Buah	850.000	B
69	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	2016	Kursi Fantoni	1	Buah	850.000	B
70	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	8	2016	Kursi Subaru	1	Buah	1.200.000	B
71	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	9	2016	Kursi Subaru	1	Buah	1.200.000	B
72	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	10	2016	Kursi Subaru	1	Buah	1.200.000	B
73	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	11	2016	Kursi Subaru	1	Buah	1.200.000	B
74	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	12	2016	Kursi Subaru	1	Buah	1.200.000	B
75	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	13	2016	Kursi Plastik Eagle Brand	1	Buah	150.000	B
76	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	14	2016	Kursi Plastik Eagle Brand	1	Buah	150.000	B
77	3.05.02.04.002	A.C Sentral	1	2016	Ac Samsung 1pk	1	Buah	4.681.600	B
78	3.05.02.04.002	A.C Sentral	2	2016	Ac Panasonic 1pk	1	Buah	4.763.000	B

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Harga Barang	Kondisi B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	3.05.02.04.002	A.C Sentral	3	2016	Ac Gree 1pk	1	Buah	4.722.250	B
80	3.05.02.04.002	A.C Sentral	4	2016	Ac Gree 1pk	1	Buah	4.722.250	B
81	3.06.01.01.048	Ups	1	2016	Ups Ica	1	Buah	990.000	RR
82	3.06.01.01.048	Ups	2	2016	Ups Ica	1	Buah	990.000	RR
83	3.06.01.01.048	Ups	3	2016	Ups Ica	1	Buah	990.000	RR
84	3.06.01.01.048	Ups	4	2016	Ups Ica	1	Buah	990.000	RR
85	3.06.01.01.048	Ups	5	2016	Ups Ica	1	Buah	990.000	RR
86	3.06.01.02.128	Camera Digital	1	2016	Camera Canon	1	Buah	2.420.000	B
87	3.06.01.02.128	Camera Digital	2	2016	Camera Canon	1	Buah	2.420.000	B
88	3.06.01.02.128	Camera Digital	3	2018	Camera Canon	1	Buah	5.862.000	B
89	3.06.01.02.128	Camera Digital	4	2018	Camera Canon	1	Buah	5.862.000	B
90	3.06.01.02.128	Camera Digital	5	2018	Camera Canon	1	Buah	5.862.000	B
91	3.06.01.02.128	Camera Digital	6	2019	Camera Canon	1	Buah	2.585.000	B
92	3.06.01.02.128	Camera Digital	7	2019	Camera Canon	1	Buah	2.585.000	B
93	3.06.01.02.128	Camera Digital	8	2019	Camera Canon	1	Buah	2.585.000	B
94	3.06.01.05.038	Gps Receiver	1	2016	Gps Garmin	1	Buah	9.405.000	B
95	3.06.01.05.047	Kamera Udara	1	2016	Drone Dji	1	Buah	25.300.000	B
96	3.06.01.05.047	Kamera Udara	2	2019	Drone Dji Mavick	1	Buah	27.500.000	B
97	3.06.02.01.010	Facsimile	1	2016	Mesin Fax Panasonic	1	Buah	3.000.000	B
98	3.10.01.02.001	P.C Unit	1	2016	P.C Merek Hp	1	Buah	10.000.000	B
99	3.10.01.02.001	P.C Unit	2	2016	P.C Merek Hp	1	Buah	10.000.000	B
100	3.10.01.02.001	P.C Unit	3	2016	P.C Merek Hp	1	Buah	10.000.000	B
101	3.10.01.02.001	P.C Unit	4	2016	P.C Merek Lenovo	1	Buah	9.900.000	B
102	3.10.01.02.001	P.C Unit	5	2017	P.C Merek Acer	1	Buah	8.000.000	B
103	3.10.01.02.001	P.C Unit	6	2017	P.C Merek Acer	1	Buah	8.000.000	B
104	3.10.01.02.001	P.C Unit	7	2018	P.C Merek Acer	1	Buah	8.107.000	B
105	3.10.01.02.001	P.C Unit	8	2018	P.C Merek Acer	1	Buah	8.107.000	B

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Harga Barang	Kondisi B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	3.10.01.02.002	Laptop	1	2016	Asus	1	Buah	13.500.000	B
107	3.10.01.02.002	Laptop	2	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
108	3.10.01.02.002	Laptop	3	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
109	3.10.01.02.002	Laptop	4	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
110	3.10.01.02.002	Laptop	5	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
111	3.10.01.02.002	Laptop	6	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
112	3.10.01.02.002	Laptop	7	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
113	3.10.01.02.002	Laptop	8	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
114	3.10.01.02.002	Laptop	9	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
115	3.10.01.02.002	Laptop	10	2016	Dell, Hp, Toshiba	1	Buah	13.310.000	B
116	3.10.01.02.002	Laptop	11	2017	Asus	1	Buah	8.000.000	B
117	3.10.01.02.002	Laptop	12	2017	Macbook	1	Buah	16.000.000	B
118	3.10.02.01.009	Serial Printer	1	2016	Printer Lasserjet	1	Buah	1.300.000	B
119	3.10.02.03.003	Printer	1	2016	Epson	1	Buah	4.500.000	B
120	3.10.02.03.003	Printer	2	2016	Fuji Xerox	1	Buah	1.980.000	B
121	3.10.02.03.003	Printer	3	2016	Fuji Xerox	1	Buah	1.980.000	B
122	3.10.02.03.003	Printer	4	2016	Epson	1	Buah	4.400.000	B
123	3.10.02.03.003	Printer	5	2016	Hp, Epson, Canon	1	Buah	4.972.000	B
124	3.10.02.03.003	Printer	6	2016	Hp, Epson, Canon	1	Buah	4.972.000	B
125	3.10.02.03.003	Printer	7	2016	Hp, Epson, Canon	1	Buah	4.972.000	B
126	3.10.02.03.003	Printer	8	2017	Epson	1	Buah	4.000.000	B
127	3.10.02.03.003	Printer	9	2017	Epson	1	Buah	4.000.000	B
128	3.10.02.03.003	Printer	10	2017	Laserjet	1	Buah	1.500.000	B
129	3.10.02.03.003	Printer	11	2019	Canon	1	Buah	4.900.500	B
130	3.10.02.03.003	Printer	12	2019	Canon	1	Buah	4.900.500	B
131	3.10.02.03.003	Printer	13	2019	Canon	1	Buah	4.900.500	B
132	3.17.01.21.006	Shredder	1	2016	Secure	1	Buah	1.500.000	B

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Harga Barang	Kondisi B/RR/RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	3.17.01.21.006	Shredder	2	2016	Secure	1	Buah	1.400.000	B
134	3.10.02.03.004	Scanner	1	2021	Scan Snapsv	1	Buah	15.835.000	B
135	3.10.01.02.002	Laptop	13	2021	Asus	1	Buah	17.535.000	B
136	3.10.01.02.002	Laptop	14	2021	Asus	1	Buah	14.797.800	B
137	3.10.01.02.002	Laptop	15	2021	Asus	1	Buah	14.797.800	B
138	3.10.01.02.002	Laptop	16	2021	Asus	1	Buah	14.797.800	B
139	3.10.01.02.002	Laptop	17	2021	Asus	1	Buah	14.797.800	B
140	3.06.01.02.128	Camera Digital	9	2021	Sony Alpha 7	1	Buah	28.967.500	RR
141	3.05.02.06.046	Handy Cam	1	2021	Sony Hdr	1	Buah	16.967.500	B
142	3.06.01.02.045	Tripod Camera	1	2021	Tripod Takara	1	Buah	1.000.000	B
143	3.10.02.03.003	Printer	14	2021	Canon	1	Buah	4.835.000	B
144	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	1	2021	Meja Kerja Besi	1	Buah	14.000.000	B
145	3.10.01.02.002	External/Portable Hardisk	1	2021	Hdd Wd My Book 6tb	1	Buah	4.762.800	B
146	3100102002	Laptop	18	2022	Hp Pavilion Aero	1	Buah	15.900.000	B
147	3100203003	Printer	15	2022	Epson L4260	1	Buah	5.640.000	B
148	3100203003	Printer	16	2022	Epson L3210	1	Buah	3.174.000	B
149	3100203003	Printer	17	2022	Epson L3210	1	Buah	3.174.000	B
150	3100203003	Printer	18	2022	Epson L3210	1	Buah	3.174.000	B
151	3100203003	Printer	19	2022	Epson L3210	1	Buah	3.174.000	B
152	3100203003	Printer	20	2022	Epson L3210	1	Buah	3.174.000	B
153	3100203004	Scanner	2	2022	Brother Ads 1200	1	Buah	4.715.000	B
154	3100203004	Scanner	3	2022	Brother Ads 1200	1	Buah	4.715.000	B
155	3050104007	Brandkas	2	2022	Krisbow Digital Keylock Es-100 (Type Fire Safe)	1	Buah	23.360.000	B
156	3100102002	Laptop	19	2022	Laptop Msi Stealth Gs77	1	Buah	71.939.000	B
							156 NUP	964.059.600	

1.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Anggaran pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I merupakan anggaran gabungan dari DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikut :

1. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 5 (lima) DIPA pada unit organisasi :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
 - c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
 - d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; dan
 - e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
2. Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua memiliki 4 (empat) DIPA pada unit organisasi:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
 - c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan
 - d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 1.12 Pagu Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

No	Unit Organisasi / Satuan Kerja	Pagu (Rp)
I Sekretariat Jenderal		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	1.889.197.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	1.120.850.000
TOTAL		3.010.047.000
II Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	358.828.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	70.903.000
TOTAL		424.731.000
II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	356.166.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	18.166.637.000
TOTAL		18.522.803.000
III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		

No	Unit Organisasi / Satuan Kerja	Pagu (Rp)
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	389.211.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	57.986.000
	TOTAL	447.197.000
IV	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	145.737.000

Sumber : DIPA Satker BP3KP Papua I dan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Tahun 2026

Pada Tabel 1.12 dapat dilihat bahwa Balai Pelaksana Perumahan dan Kawasan permukiman Papua I mengelola total anggaran sebesar **Rp. 22.550.515.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)** dari 5 (lima) DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan 4 (empat) DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.

1.4.1 DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Berikut akan diuraikan DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I yang terdiri dari DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

A. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Sekretariat Jenderal (691429)

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Sekretariat Jenderal yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Awal yaitu DIPA Revisi ke 01 dengan nomor SP DIPA-146.01.1.691429/2026 pada tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp. 1.889.197.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.11



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691429/2026



DS:1403-2525-#483-0776

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (691429)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Sebesar	: Rp. 1.889.197.000	(SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.889.197.000
146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	1.889.197.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.889.197.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBSP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBSP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SSGN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA	(063) Rp.	1.889.197.000
------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.11 DIPA Satker BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal

Rincian kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai dengan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. 13 Rincian Kegiatan DIPA Awal Satker BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	WA	Program Dukungan Manajemen		1.889.197.000
2	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		1.889.197.000
3	7655.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	2	1.827.362.000
4	765.EBA.962	Layanan Umum	1	82.136.000
5	765.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1.745.226.000
6	765.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	61.835.000
7	765.EBB.951	Langganan Sarana Internal	1	61.835.000

Sumber : DIPA Revisi 1 Satker BP3KP Papua I tanggal 29 Desember 2025, Sekretariat Jenderal

B. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691483)

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Awal yaitu DIPA Revisi ke 01 dengan nomor SP DIPA-146.03.01.691483/2026 tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp. 353.828.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.12

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691483/2026		Revisi ke 01 Tanggal : 29 Desember 2025																																																	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026																																																					
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: <table border="0"> <tr> <td>1. Kementerian Negara/Lembaga</td> <td>: (146)</td> <td>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</td> </tr> <tr> <td>2. Unit Organisasi</td> <td>: (03)</td> <td>DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN</td> </tr> <tr> <td>3. Provinsi</td> <td>: (25)</td> <td>PAPUA</td> </tr> <tr> <td>4. Kode/Nama Satker</td> <td>: (691483)</td> <td>Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I</td> </tr> <tr> <td>Sebesar</td> <td>: Rp. 353.828.000</td> <td>(TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)</td> </tr> </table>						1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN	3. Provinsi	: (25)	PAPUA	4. Kode/Nama Satker	: (691483)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Sebesar	: Rp. 353.828.000	(TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)																																	
1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																																			
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN																																																			
3. Provinsi	: (25)	PAPUA																																																			
4. Kode/Nama Satker	: (691483)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I																																																			
Sebesar	: Rp. 353.828.000	(TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)																																																			
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :																																																					
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :																																																					
C. Sumber Dana Berasal Dari : <table border="0"> <tr> <td>1. Rupiah Murni</td> <td>Rp.</td> <td>353.828.000</td> <td>4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. PNBP</td> <td>Rp.</td> <td></td> <td>- Pinjaman Dalam Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- PNBP TA Berjalan</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>- Hibah Dalam Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>5. Hibah Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- Pinjaman Luar Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>- Hibah Luar Negeri Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- Hibah Luar Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td>- Hibah Dalam Negeri Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D. Pencairan dana dilakukan melalui :</td> <td></td> <td></td> <td>6. SSN PBS</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1. KPKN JAYAPURA</td> <td>(063) Rp.</td> <td>353.828.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1. Rupiah Murni	Rp.	353.828.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SSN PBS	Rp.	0	1. KPKN JAYAPURA	(063) Rp.	353.828.000			
1. Rupiah Murni	Rp.	353.828.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0																																																
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0																																																
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0																																																
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0																																																
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SSN PBS	Rp.	0																																																
1. KPKN JAYAPURA	(063) Rp.	353.828.000																																																			
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.																																																					
Jakarta, 01 Desember 2025 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002																																																					

Gambar 1.12 DIPA Satker BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Rincian kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai dengan DIPA Kawasan Permukiman Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 1.14 Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		242.188.000
2	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		242.188.000
3	7659.BMA	Data dan Informasi Publik	1	33.427.000
4	7659.BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	33.427.000
5	7659.CBR	Dukungan Teknis	1	93.900.000

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
6	7659.CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	93.900.000
7	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1	114.861.000
8	7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	114.861.000
9	WA	Program Dukungan Manajemen		111.640.000
10	7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		111.640.000
11	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	111.640.000
12	EBA.962	Layanan Umum	1	57.758.000
13	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	12.382.000
14	EBA.Z06	Layanan BMN	1	41.500.000

Sumber : DIPA Revisi 1 Satker BP3KP Papua I tanggal 29 Desember 2025, Dirjen Kawasan Permukiman

C. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Awal yaitu DIPA Revisi ke 01 dengan nomor SP DIPA-146.04.1.691537/2026 tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp. 356.166.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.13



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691537/2026



DS-4382-6207-0406-5030

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi : (25) PAPUA
4. Kode/Nama Satker : (691537) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Sebesar : Rp. 356.166.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 356.166.000 2. PNBP Rp. 0 - PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 356.166.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
---	--

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 19700327199031002

Gambar 1. 13 DIPA Satker BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Rincian kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perdesaan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		313.198.000
2	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		313.198.000
3	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3	152.421.000
4	7660.ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	1	42.595.000
5	7660.ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	63.135.000
6	7660.ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	46.691.000
7	7660.BMA	Data dan Informasi Publik	1	22.303.000

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
8	7660.BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	22.303.000
9	7660.CBR	Dukungan Teknis	2	54.597.000
10	7660.CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan	1	36.175.000
11	7660.CBR.002	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1	18.422.000
12	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	71.432.000
13	7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	30.062.000
14	7660.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	41.370.000
15	7660.PEA	Koordinasi	1	12.445.000
16	7660.PEA.001	Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1	12.445.000
15	WA	Program Dukungan Manajemen		42.968.000
16	7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		42.968.000
17	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	42.968.000
18	7675.EBA.962	Layanan Umum	1	22.500.000
19	7675.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	20.468.000

Sumber : DIPA Revisi 1 Satker BP3KP Papua I tanggal 29 Desember 2025, Dirjen Perumahan Perdesaan

D. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691591)

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Awal yaitu DIPA Revisi ke 01 dengan nomor SP DIPA 146.05.1.691591/2026 tanggal 29 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 389.211.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.14



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691591/2026



DS-0078-0488-7600-4833

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (145) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi : (25) PAPUA
4. Kode/Nama Satker : (691591) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Sebesar : Rp. 389.211.000 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	389.211.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAYAPURA (083) Rp. 389.211.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Rd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.14 DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perkotaan

Pada DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memuat 2 (dua) program yaitu program perumahan dan kawasan permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 295.156.000 dan program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 94.055.000. Adapun rincian kegiatannya tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perkotaan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		295.156.000
2	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		295.156.000
3	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	5	241.191.000
4	7661.ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	60.514.000
5	7661.ABF. 002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1	36.443.000

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
6	7661.ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	36.443.000
7	7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	53.291.000
8	7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	1	231.235.000
9	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	53.965.000
10	WA	Program Dukungan Manajemen		94.055.000
11	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		94.055.000
12	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	94.055.000
13	7676.EBA.956	Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1	40.924.000
14	7676.EBA.962	Layanan Umum	1	28.740.000
15	7676.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	24.391.000

Sumber : DIPA Revisi 1 Satker BP3KP Papua I tanggal 29 Desember 2025, Dirjen Perumahan Perkotaan

E. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691612)

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan nomor SP DIPA-146.04.1.691612/2026 tanggal 01 Desember 2025 sebesar Rp253.411.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.15



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691612/2026



DS.3738-0344-5565-6849

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (691612)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Sebesar	: Rp. 253.411.000	(DUA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

	Rp.	253.411.000	Jumlah Uang
	Rp.		253.411.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	253.411.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 253.411.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

Gambar 1.15 DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Pada DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memuat program perumahan dan kawasan permukiman dengan rincian kegiatan Tahun 2026 sebagai berikut :

**Tabel 1.15 Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I
Dirjen Tata Kelola Pengendalian Risiko**

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		253.411.000
2	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		253.411.000
3	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	3	210.691.000
4	7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	60.691.000
5	7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2	150.000.000
6	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan	1	42.720.000

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
		Pengendalian Risiko (Laporan, Layanan)		
7	7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1	42.720.000

Sumber : DIPA Satker BP3KP Papua I, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1.4.2 DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua

Berikut akan diuraikan DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua yang terdiri dari DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

A. DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Sekretariat Jenderal (691430)

DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Sekretariat Jenderal yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Awal yaitu DIPA Revisi ke 01 dengan nomor SP DIPA-146.01.1.691430/2026 tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp. 1.120.850.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.16



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691430/2026



05 2585-5201-5563-5620

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode>Nama Satker	: (691430)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
Sebesar	: Rp. 1.120.850.000	(SATU MILIAR SERATUS DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Rp.	Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :		
1. Rupaiah Murni	Rp. 1.120.850.000	
2. PINBP	Rp. 0	
- PINBP TA Berjalan	Rp. 0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0	
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	
5. Hibah Langsung	Rp. 0	
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0	
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0	
6. SBSN PBS	Rp. 0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui :		
1. KPKN JAYAPURA	(063) Rp. 1.120.850.000	

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.16 DIPA Satker PKP Provinsi Papua Sekretariat Jenderal

Rincian kegiatan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sesuai dengan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.16

Tabel 1.16 Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Sekretariat Jenderal

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	WA	Program Dukungan Manajemen		1.120.850.000
2	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		1.120.850.000
3	7655.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	2	1.079.627.000
4	765.EBA.962	Layanan Umum	1	33.326.000
5	765.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1.046.301.000
6	765.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	41.223.000
7	765.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	41.223.000

Sumber : DIPA Revisi 1 Satker PKP Provinsi Papua tanggal 29 Desember 2025, Sekretariat Jenderal

B. DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691484)

DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Awal yaitu DIPA Revisi ke 01 dengan nomor SP DIPA-146.03.01.691484/2026 tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp. 70.903.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.17



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691484/2026



DS:1441-1809-0853-0275

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker : (691484)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
Sebesar : Rp. 70.903.000	(TUJUH PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.WA Program Dukungan Manajemen
146.03.WA. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

	Rp.	Rp.	Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :			
1. Rupiah Murni	Rp. 70.903.000		
2. PNBP	Rp. 0		
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0		
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0		
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
5. Hibah Langsung	Rp. 0		
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0		
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0		
6. SBSN PBS	Rp. 0		
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			
1. KPPN JAYAPURA	(003) Rp. 70.903.000		

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.17 DIPA Satker PKP Provinsi Papua Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Rincian kegiatan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sesuai dengan DIPA Kawasan Permukiman Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 1.17 Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Kawasan Permukiman

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	WA	Program Dukungan Manajemen		70.903.000
2	7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2	70.903.000
3	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	70.903.000
4	7674.EBA.962	Layanan Umum	1	70.903.000

Sumber : DIPA Revisi 1 Satker PKP Provinsi Papua tanggal 29 Desember 2025, Dirjen Kawasan Permukiman

C. DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691538)

DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Awal yaitu DIPA Revisi ke 01 dengan nomor SP DIPA-146.04.1.691538/2026 tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp. 18.166.637.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.18



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691538/2026



DS-4276-5075-5778-8999

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	:	(691538)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
Sebesar	:	Rp. 18.166.637.000	(DELAPAN BELAS MILIAR SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	18.166.637.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN : JAYAPURA (063) Rp. 18.166.637.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271965031002

Gambar 1.18 DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perdesaan

Rincian kegiatan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026 sebagai berikut

Tabel 1.18 Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perdesaan

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		18.136.507.000
2	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		18.136.507.000
3	7660.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	42	18.073.479.000
4	7660.CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	42	18.073.479.000
5	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, layanan)	1	63.028.000
6	7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan (Laporan)	1	63.028.000
3	WA	Program Dukungan Manajemen		30.130.000
4	7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2	30.130.000
5	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	30.130.000
6	7675.EBA.962	Layanan Umum	1	30.130.000

Sumber : DIPA Revisi 1 Satker PKP Provinsi Papua tanggal 29 Desember 2025, Dirjen Perumahan Perdesaan

D. DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691592)

DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Awal yaitu DIPA Revisi ke 01 dengan nomor SP DIPA 146.05.1.691592/2026 tanggal 29 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 57.986.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.19



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691592/2026



DS:7059-9960-6470-8752

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (691592)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
Sebesar	: Rp. 57.986.000	(LIMA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	57.986.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPN JAYAPURA	(063) Rp.	57.986.000
-----------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Pertikaran Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025

A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

LUKY ALFIRMAN

NIP. 197003271965031002

Gambar 1.19 DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perkotaan

Rincian kegiatan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 1.19 Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perkotaan

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		35.186.000
2	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		35.186.000
3	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	35.186.000
4	7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	35.186.000
5	WA	Program Dukungan Manajemen		22.800.000
6	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2	22.800.000
7	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	22.800.000
8	7676.EBA.962	Layanan Umum	1	22.800.000

Sumber : DIPA Revisi 1 Satker PKP Provinsi Papua tanggal 29 Desember 2025, Dirjen Perumahan Perkotaan

1.5 Aspek strategis dan isu strategis

1.5.1 Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan aspek yang menjadi visi, misi dan tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang tertentu dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu terlaksananya target program penyediaan 3 juta rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat mencakup pembangunan baru dan renovasi.

1.5.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah informasi atas kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan / atau perumusan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan berjangka panjang. Adapun isu strategis yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam penyediaan rumah layak huni di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan yaitu :

1. Perlu adanya kolaborasi antar *stakeholder* dalam tahapan perencanaan teknis, pematangan lahan dan mitigasi risiko pembangunan 2200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan dilaksanakan terintegrasi dan tepat sasaran dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
2. Kondisi geografis di wilayah Provinsi Papua Pegunungan didominasi pegunungan tinggi, lembah curam, dan medan yang terjal menyebabkan sulitnya akses ke lokasi bantuan perumahan.
3. Konflik sosial dan kondisi keamanan di zona merah wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I khususnya di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah menghambat pelaksanaan pembangunan perumahan.
4. Masih banyaknya permukiman tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh dengan kepadatan tinggi, sanitasi buruk, akses air bersih minim, serta konstruksi bangunan tidak memenuhi standar teknis dan kesehatan.
5. Masih tingginya angka *backlog* kepenghunian dan kepemilikan serta jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
6. Kendala administrasi dalam pelaksanaan verifikasi karena calon penerima bantuan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), kumuh dan sanitasi tidak memiliki bukti kepemilikan sah atas tanah dapat menyebabkan calon penerima bantuan tidak lolos verifikasi.

7. Kendala pelaksanaan serah terima aset karena belum lengkapnya dokumen internal dan eksternal yang dipersyaratkan untuk hibah atau alih status.
8. Kendala anomali data usulan calon penerima bantuan (penerima sudah meninggal, pindah, atau status ekonominya meningkat) sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi melalui basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan perumahan tepat sasaran.
9. Kurangnya koordinasi dan validitas data antar sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dapat mengakibatkan program perumahan tidak tepat sasaran, kurang efektif atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
10. Pekerjaan pembangunan perumahan tidak selesai tepat waktu dikarenakan keterbatasan tenaga kerja tukang baik kuantitas maupun kualitas, ketersediaan bahan bangunan dan material, Keterbatasan infrastruktur dasar (jaringan listrik dan air) di daerah pembangunan perumahan khususnya di wilayah pedesaan, keterbatasan pendampingan teknis (fasilitator lapangan) dan kondisi cuaca buruk yang menghambat jadwal pelaksanaan pekerjaan.
11. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Ketidakseimbangan jumlah sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan beban pekerjaan dan luas cakupan wilayah balai dapat menghambat pengawasan kualitas pekerjaan di lapangan.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan bagian penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan pemberi amanah yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktur Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Target Perencanaan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I perlu diwujudkan sebagai upaya tercapainya sasaran yang tepat. Ketepatan capaian kinerja tentu akan menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama melalui Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 167/ND/Sj.01/2026 tanggal 26 Maret 2026 hal Permohonan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2026, poin 4.c disebutkan bahwa ketentuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu merujuk pada target kinerja serta anggaran pada dokumen DIPA yang terbit setelah revisi RO khusus (DIPA revisi 01 tanggal 29 Desember 2025).

2.1.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 3.010.047.000 (Tiga Miliar Sepuluh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terdiri dari anggaran Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 1.889.197.000 (Satu Miliar

Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan anggaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 1.120.850.000 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Sekretariat Jenderal disusun mengacu kepada sasaran program/sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama di dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2025-2029.

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA	AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : P.M Desyarmeda Killian Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Didyk Choiroel Jabatan : Sekretaris Jenderal Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua  Didyk Choiroel NIP. 197104161992011001	Jakarta, 10 April 2026 Pihak Pertama  P.M. Desyarmeda Killian NIP. 197912272006052001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	1 Jumlah Layanan Umum	2 layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	2 layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	2 unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua

ANGGARAN

Rp	1,889,197,000.00
Rp	<u>1,120,850,000.00</u>
Rp	3,010,047,000.00

Jakarta, 10 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I

P.M. DESYARMEDA KILLIAN

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal TA 2026

2.1.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 424.731.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) terdiri dari anggaran Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 353.828.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan anggaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 70.903.000 (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman disusun mengacu kepada sasaran program/sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama di dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2025-2029.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **P.M Desyarmeda Killian**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
 Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

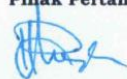
Jakarta, 27 Maret 2026

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



P.M. Desyarmeda Killian
NIP. 197912272006052001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 dokumen
		2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 dokumen
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	2 layanan
		2 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 layanan
		3 Jumlah Layanan BMN	1 layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I		Rp	353.828.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua		Rp	70.903.000,00
		Rp	424.731.000,00
Jakarta, 27 Maret 2026			
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  FITRAH NUR		KEPALA BALAI PELAKSANA PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I  P.M. DESYARMEDA KILLIAN	

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman TA 2026

2.1.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 18.522.803.000 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) terdiri dari anggaran Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 356.166.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan

anggaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 18.166.637.000 (Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan disusun mengacu kepada sasaran program/sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama di dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2025-2029.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **P.M Desyarmeda Killian**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 7 April 2026

Pihak Pertama



P.M. Desyarmeda Killian
NIP. 197912272006052001

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		2 Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		3 Jumlah Unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	42 Unit
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan

1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Layanan Umum	2	Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan

KEGIATAN

Anggaran

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua

Rp 356.166.000,00
Rp 18.166.537.000,00
Rp 18.522.803.000,00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

Jakarta, 7 April 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PELAKSAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PAPUA I

P.M. DESYARMEDA KILLIAN

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2026

2.1.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 447.197.000 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu) terdiri dari anggaran satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 389.211.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 57.986.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan disusun mengacu kepada sasaran program/sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama di dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2025-2029.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **P.M Desyarmada Killian**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

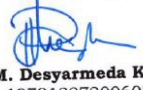
Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 197407071997032004

Pihak Pertama



P.M. Desyarmada Killian
NIP. 197912272006052001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemenuhan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan 2 Laporan
2.	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan 2. Jumlah Layanan Umum 3. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan 2 Layanan 1 Layanan

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua

PAGU APBN

Rp 389.211.000,00

Rp 57.986.000,00

Rp 447.197.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I



P.M. DESYARMEDA KILLIAN

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA. 2026

2.1.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendapat alokasi pagu anggaran

sebesar Rp. 145.737.000 (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Awal Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disusun mengacu kepada sasaran program/sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama di dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2025-2029.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mickhael Nicolas Demena**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

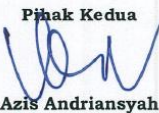
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

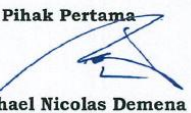
Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama



Mickhael Nicolas Demena
NRP. 198008132003121004

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

- 1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp

145,737,000.00

Jakarta, 28 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN
RISIKO


AZIS ANDRIANSYAH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I


MICKHAEL NICOLAS DEMENA

**Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA.2026**

2.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua akan melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja.

2.2.1 Program dan Kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I yaitu

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sasaran program meningkatnya hunian layak dan meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyelenggaraan sistem dan strategi, penyelenggaraan penyiapan lahan dan prasarana, sarana, utilitas umum, penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas, penyelenggaraan pembiayaan perumahan, penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman
2. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Papua I. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu dukungan manajemen BP3KP Papua I.

Berikut target Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai PK Awal dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1Target Indikator Kinerja sesuai PK Awal Tahun 2026

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
Unor : Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SP	Meningkatnya hunian layak		
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan sistem dan strategi			
SK	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni		
Output :			
1	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
2	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1 rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 2 : Penyediaan rumah layak huni			
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		
Output :			
1	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
Program Dukungan Manajemen			
SP	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Papua I		
Kegiatan : Dukungan manajemen Penyelenggaraan Perumahan			
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen BP3KP Papua I		
Output :			
1	Jumlah layanan umum	2 layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
2	Jumlah layanan data dan informasi	1 layanan	Satker BP3KP Papua I
3	Jumlah layanan BMN	1 layanan	Satker BP3KP Papua I
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SP	Meningkatnya hunian layak		
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi			
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan		
1	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 rekomendasi kebijakan	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	2 laporan	Satker BP3KP Papua I Satker PKP Provinsi Papua
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum			
SK	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan		
1	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan			

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
SK	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan		
Output :			
1	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan	1 kegiatan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 4 : Penyediaan Rumah Layah Huni			
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan		
Output :			
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1 rekomendasi kebijakan	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan perdesaan	1 laporan	Satker BP3KP Papua I
3	Jumlah unit rumah susun asrama pendidikan keagamaan	42 unit	Satker PKP Provinsi Papua
Kegiatan 5: Peningkatan Kualitas Perumahan			
SK	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan		
Output :			
1	Jumlah kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	1 rekomendasi kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Program Dukungan Manajemen			
SP	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Papua I		
1	Jumlah layanan umum	2 layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
2	Jumlah layanan data dan informasi	1 layanan	Satker BP3KP Papua I
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SP	Meningkatnya hunian layak		
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi			
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan		
Output :			
1	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan	2 Laporan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum			
SK	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan		
Output :			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan			
SK	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan wilayah perkotaan		
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 4 : Penyediaan Rumah yang Layak Huni di Perkotaan			
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni baru di perkotaan		
Output :			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 5 : Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan			
SK	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas Pembangunan perumahan di wilayah perkotaan		
Output :			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Program Dukungan Manajemen			
SP	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Papua I		
Kegiatan : Dukungan manajemen Penyelenggaraan Perumahan			
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen		
Output :			
1	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah Layanan Umum	2 Layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Satker BP3KP Papua I
Unor : Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SP	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		
Kegiatan : Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
SK	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		
Output :			
1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
SK	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		
1	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Unor : Sekretariat Jenderal			
Program Dukungan Manajemen			
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Papua I		
Kegiatan : Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			
SK	Meningkatnya dukungan manajemen BP3KP Papua I		
Output :			
1	Jumlah layanan umum	2 layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
2	Jumlah layanan perkantoran	2 layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
3	Jumlah layanan sarana internal	2 unit	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua

2.3 Metode Pengukuran

Dalam upaya pencapaian sasaran program digunakan metode pengukuran sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan target sasaran yang menjadi tujuan kegiatan pelaksanaan pembangunan perumahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Evaluasi terhadap capaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

NO	KONDISI	KETERANGAN
1	$X > 100\%$	Sangat Baik
2	$85\% < X \leq 100\%$	Baik
3	$85\% < X \leq 85\%$	Cukup Baik
4	$55\% < X \leq 85\%$	Sedang
5	$X \leq 55\%$	Kurang

2.4 Target Kinerja Triwulan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I menjabarkan target pencapaian tahun 2026 dalam waktu triwulan (3 bulan). Besaran target kinerja triwulan ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan.

Tabel 2.2 Target Rencana fisik BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEPT	OKT	NOV	DES	
Program Dukungan Manajemen																		
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	EBA.962.100	Layanan Umum	Layanan Umum BP3KP Papua I	Layanan	1	5	30	60	65	70	75	80	85	87	90	95	100
	2	EBA.994.002	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	5	25	45	55	65	70	75	80	85	90	95	100
	3	EBB.951.100	Layanan Sarana Internal	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	2	5	10	25	45	80	95	100	100	100	100	100	100
		EBB.951.101		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi														
Satker PKP Provinsi Papua																		
	1	EBA.962.100	Layanan Umum	Layanan Umum Pelaksanaan Kegiatan Kesatkeran	Layanan	1	0	8	18	31	42	51	62	69	76	82	89	100
	2	EBA.994.002	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	3	EBB.951.100	Layanan Sarana Internal	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Layanan	1	0	0	0	0	5	5	5	5	5	100	100	100

Tabel 2.3 Target Rencana fisik BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	BMA.001.101	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai P3KP Papua	Dokumen	1	0	6	9	12	20	35	50	65	75	85	95	100
	2	PBF.001.101	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di BP3KP Papua I	Rekomendasi Kebijakan	1	0	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	CBR.002.100	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Balai P3KP Papua I	Dokumen	1	15	30	45	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Program Dukungan Manajemen																		
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	EBA.962.100	Layanan Umum	Layanan Umum Direktorat Jenderal KP pada BP3KP Papua I	Layanan	1	5	25	55	65	70	75	80	85	90	93	96	100
	2	EBA.963.100	Layanan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi pada BP3KP Papua I	Layanan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
	3	EBA.Z06.100	Layanan BMN	Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal KP pada BP3KP Papua I	Layanan	1	5	50	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
Satker PKP Provinsi Papua																		
		EBA.962	Layanan Umum	Layanan Umum Direktorat Jenderal KP pada Satker PKP Provinsi Papua	Layanan	1	3	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Tabel 2.4 Target Rencana fisik BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	ABF.009.102	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	3	7	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	2	BMA.001.100	Data dan Informasi Publik	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	8	16	24	28	35	45	55	65	75	85	95	100
	3	FAE.001.100	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	0	5	15	25	30	40	50	60	65	75	85	100
Satker PKP Provinsi Papua																		
	1	FAE.001.100	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	0	5	15	25	30	40	50	60	65	75	85	100
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan																	
	1	CBR.001.100	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	Identifikasi dan Perencanaan Penyiapan Lahan dan Perizinan	Dokumen	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
	2	CBR.002.100	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	Identifikasi dan Perencanaan Penghunian Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan																	

NO	KODE		PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK											
							TW I			TW II			TW III			TW IV		
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
		PEA.001.100	Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	ABF.007.100	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Pedesaan	Kebijakan	1	12	20	30	40	50	60	70	80	84	88	94	100
	2	FAE.004.101	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
Satker PKP Provinsi Papua																		
	1	CBB.001.101	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo	Unit	21	0	0	0	0	0	0	15	30	55	75	95	100
				Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya	Unit	21	0	0	0	0	0	15	30	55	75	95	100	
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	ABF.008.101	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	Verifikasi Calon Penerima Bantuan Penigkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Dukungan Manajemén																		
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan																	

NO	KODE		PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK											
							TW I			TW II			TW III			TW IV		
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
Satker BP3KP Papua I																		
	1	EBA.962.100	Layanan Umum	Layanan Umum BP3KP Papua I	Layanan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
	2	EBA.963.100	Layanan Data dan Informasi	Publikasi Data dan Informasi Balai P3KP Papua I	Layanan	1	5	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
Satker PKP Provinsi Papua																		
		EBA.962.100	Layanan Umum	Layanan Umum pada Satker PKP Provinsi Papua	Layanan	1	3	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Tabel 2.5 Target Rencana fisik BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	ABF.001.102	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Perencanaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	Rekomendasi Kebijakan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
	2	FAE.001.102	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	5	10	25	45	55	65	75	80	85	90	95	100
Satker PKP Provinsi Papua																		
		FAE.001.102	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	0	5	15	25	30	40	50	60	65	75	85	100
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	ABF.002.103	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Fasilitasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	5	10	25	55	70	80	90	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan																	
Satker BP3KP Papua I																		

NO	KODE		PROGRAM/ KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK											
							TW I			TW II			TW III			TW IV		
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
		ABF.003.101	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Fasilitasi dan Pemantauan Penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan																	
Satker BP3KP Papua I																		
		ABF.004.102	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan																	
Satker BP3KP Papua I																		
		ABF.005.101	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	5	8	13	17	25	35	50	65	75	85	95	100
Program Dukungan Manajemen																		
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	EBA.956.101	Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	Rencana Kebutuhan dan Pengelolaan BMN Perumahan Perkotaan Balai P3KP	Layanan	1	5	33	66	75	85	95	100	100	100	100	100	100
	2	EBA.962.106	Layanan Umum	Layanan Umum pada BP3KP Papua I	Layanan	1	5	15	25	35	45	55	65	75	85	90	95	100
	3	EBA.963.101	Layanan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	Layanan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
Satker PKP Provinsi Papua																		
	1	EBA.962.100	Layanan Umum	Layanan Umum pada Satker PKP Provinsi Papua	Layanan	1	3	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Tabel 2.6 Target Rencana fisik BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET FISIK												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	ABF.004.100	Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Papua I	Rekomendasi Kebijakan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	ABF.005.100	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko	Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP Papua I	Rekomendasi kebijakan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
	2	ABF.005.101	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Korupsi	Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai P3KP Papua I	Rekomendasi kebijakan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman																	
Satker BP3KP Papua I																		
	1	FAE.001.100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100

BAB III PENUTUP

Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun Anggaran 2026 merupakan Laporan Rencana Informasi Kinerja yang terukur yang akan dicapai atas Kinerja Tahunan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Proses pencapaian sasaran dalam Rencana Aksi tidak terlepas dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun dalam pelaksanaan Rencana Aksi selama setahun kedepan terdapat berbagai kendala/hambatan yang akan dihadapi. Berikut upaya yang dilakukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam mencapai target yang telah ditentukan di tahun 2026 :

1. Penguatan sumber daya manusia melalui pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis beban kerja (ABK) dan kompetensi.
2. Penguatan perencanaan dan penganggaran melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk memastikan anggaran yang disusun berorientasi pada kinerja, efektif, dan efisien.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan dimulai dari saat pra-pelaksanaan hingga proses pelaksanaan pembangunan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.
4. Meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mendorong peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam program pembangunan 3 juta rumah.
5. Mempercepat pelaksanaan serah terima aset perumahan.
6. Penguatan tata kelola komunikasi publik dan pelayanan publik dengan cara peningkatan pelayanan publik berbasis digital melalui media sosial, website dan aplikasi sebagai media utama penyebaran informasi dan edukasi program yang dilaksanakan BP3KP Papua I.
7. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan SMAP di lingkungan BP3KP Papua I untuk menciptakan unit kerja yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
8. Penerapan manajemen risiko di lingkungan BP3KP Papua I untuk memastikan program pembangunan 3 juta rumah dan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Demikian Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.